

TATA KELOLA KOLABORATIF PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI DESA NUSA AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Catarina Hariyani¹, I Gusti Made Darma², Rindy Putri Hapsari³, Ariyanto⁴

¹Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Belitang, Indonesia; catarinahariyani4@gmail.com

²Institut Bina Marta, Indonesia; made69687@gmail.com

³Universitas Sriwijaya, Indonesia; rindypurthapsari@fisip.unsri.ac.id

⁴Institut Bina Marta, Indonesia; Aryacomba@gmail.com

* Corresponding Author : catarinahariyani4@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Diterima: 10 Juni 2026 Direvisi: 25 Juni 2026 Disetujui: 08 Juli 2026 Tersedia Daring: 29 Juli 2026	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan melalui penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Nusa Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa, pengelola PAUD, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, serta orang tua peserta didik. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif telah diwujudkan melalui komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara pemerintah desa, pengelola PAUD, dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Bentuk kolaborasi tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan pembiayaan sesuai kemampuan anggaran desa, pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta koordinasi dalam mengidentifikasi kebutuhan PAUD. Meskipun demikian, efektivitas kolaborasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, belum memadainya fasilitas pendidikan, terbatasnya tenaga pendidik, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif melalui peningkatan kapasitas pemerintah desa, optimalisasi koordinasi antarpemangku kepentingan, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
ABSTRACT	
Keywords: Collaborative Governance; Sustainable Rural; Development, Village Government; Community; Early Childhood Education (ECE)	<i>This study aims to analyse collaborative governance between the village government and the community in achieving sustainable rural development through the strengthening of Early Childhood Education (ECE) in Nusa Agung Village, East Ogan Komering Ulu Regency, Indonesia. The study employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving the Village Head, village officials, ECE administrators, teachers, community leaders, and parents of ECE students. Data were analysed using the interactive model developed by Miles, Huberman, and Saldaña, which consists of data condensation, data display, and conclusion drawing, while data trustworthiness was ensured through source, technique, and time triangulation. The findings indicate</i>

that collaborative governance has been implemented through communication, coordination, and synchronisation among the village government, ECE administrators, and the community to support the provision of Early Childhood Education. The collaboration includes the provision of educational facilities and infrastructure, financial support in accordance with the village budget capacity, community involvement in village deliberation meetings, and coordination in identifying ECE needs. Nevertheless, the effectiveness of this collaboration continues to face several challenges, including limited funding, inadequate educational facilities, a shortage of qualified teaching personnel, and suboptimal community participation. Therefore, strengthening collaborative governance through enhancing the capacity of the village government, optimising coordination among stakeholders, and increasing community participation is essential for supporting sustainable rural development.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Sejak diberlakukannya kebijakan pembangunan berbasis desa melalui (Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2024), pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola potensi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pembangunan desa tidak lagi hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam membangun kemitraan dengan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2024; United Nation, 2025).

Konsep pembangunan desa berkelanjutan (*sustainable village development*) menempatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kolaborasi tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah desa, tetapi juga masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, serta sektor swasta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. (Ansell & Gash, 2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu pengaturan kelembagaan yang melibatkan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif melalui dialog, pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen bersama, serta pembagian tanggung jawab. Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan efektivitas kebijakan publik karena setiap keputusan disusun berdasarkan kebutuhan, aspirasi, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan. (Emerson dkk., 2012) juga menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat ditentukan oleh kualitas

komunikasi, koordinasi, kepemimpinan, dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki setiap aktor yang terlibat.

Dalam perspektif pembangunan desa, penerapan tata kelola kolaboratif memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap berbagai program pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah desa, tetapi juga meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap hasil pembangunan sehingga mendorong keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sejalan dengan hal tersebut, (World Bank, 2022) menegaskan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah mampu mengintegrasikan kapasitas kelembagaan dengan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Sementara itu, (United Nations Development Programme, 2024) menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan salah satu fondasi utama dalam memperkuat ketahanan pembangunan lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Salah satu bidang pembangunan yang membutuhkan kolaborasi intensif antara pemerintah desa dan masyarakat adalah sektor pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan anak usia dini merupakan tahap fundamental dalam membentuk perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan karakter anak sehingga menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. (UNESCO, 2021) menegaskan bahwa pendidikan berkualitas merupakan salah satu tujuan utama dalam Sustainable Development Goals (SDG 4) yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyediaan layanan PAUD yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif pemerintah desa, keluarga, dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia melalui (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023) juga menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan pendidikan memerlukan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan penyelenggaraan pendidikan, serta penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Penguatan kolaborasi tersebut semakin penting mengingat pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengalokasikan sebagian sumber daya pembangunan desa untuk mendukung penyelenggaraan layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan PAUD di wilayah pedesaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa membangun sinergi dengan masyarakat dalam mendukung penyediaan fasilitas, pembiayaan, maupun pemberdayaan masyarakat.

Fenomena tersebut juga ditemukan pada penyelenggaraan PAUD Mutiara Hati di Desa Nusa Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Berdasarkan hasil observasi awal, penyelenggaraan PAUD masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya jumlah tenaga pendidik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak pada lembaga PAUD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu

layanan pendidikan anak usia dini tidak hanya bergantung pada kapasitas lembaga pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah desa melalui penyediaan infrastruktur, alokasi pembiayaan, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan. (UNICEF Indonesia, 2023) menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2023) menempatkan penguatan layanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan nasional.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi *collaborative governance* dalam pembangunan desa maupun partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tata kelola pemerintahan desa secara umum atau efektivitas pelayanan publik. Penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana tata kelola kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat diwujudkan dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan melalui penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), khususnya pada konteks desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif *collaborative governance* dengan konsep *sustainable village development* pada sektor pendidikan anak usia dini sebagai bagian dari pembangunan sosial masyarakat desa. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan melalui penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Nusa Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori *collaborative governance* dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan serta menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam memperkuat kemitraan dengan masyarakat guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena tata kelola kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan melalui penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Nusa Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Metode studi kasus digunakan karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara komprehensif dinamika kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam konteks nyata, termasuk pola interaksi, proses pengambilan keputusan, faktor pendukung dan penghambat, serta makna yang dibangun oleh para aktor dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang berorientasi pada pemahaman terhadap suatu fenomena sosial secara kontekstual (Creswell & Poth, 2017; Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Nusa Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan fokus pada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mutiara Hati sebagai salah satu program pembangunan desa di bidang pendidikan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena desa tersebut memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu adanya keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan layanan PAUD sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses tata kelola kolaboratif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, perangkat desa, pengelola PAUD, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, serta orang tua peserta didik. Pemilihan informan dilakukan hingga informasi yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan (*data saturation*), sehingga data yang dikumpulkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyelenggaraan PAUD, bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta kondisi sarana dan prasarana pendidikan. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman, persepsi, peran, dan pandangan para informan terhadap pelaksanaan tata kelola kolaboratif dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD, kebijakan pemerintah desa, notulen musyawarah desa, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model (Miles dkk., 2013) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses seleksi, penyederhanaan, pengelompokan, dan pengkodean data sesuai dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi, matriks, dan kategorisasi sehingga hubungan antartema dapat dipahami secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan memverifikasi temuan berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh di lapangan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memperoleh konsistensi informasi. Penerapan triangulasi tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan validitas temuan penelitian sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi empiris secara akurat.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif antara Pemerintah Desa Nusa Agung dan masyarakat telah menjadi salah satu strategi dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan melalui penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai penyelenggara pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang membangun kemitraan dengan pengelola PAUD, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, dan orang tua peserta didik. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pendidikan anak usia dini. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah desa, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan kolaboratif dengan masyarakat sebagai mitra pembangunan (Ansell & Gash, 2008; Emerson dkk., 2012).

Komunikasi sebagai Fondasi Tata Kelola Kolaboratif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Pemerintah Desa Nusa Agung dengan pengelola PAUD Mutiara Hati dan masyarakat berlangsung melalui musyawarah desa, pertemuan rutin, koordinasi informal, serta komunikasi langsung ketika muncul permasalahan dalam penyelenggaraan PAUD. Melalui proses komunikasi tersebut, pemerintah desa memperoleh berbagai informasi mengenai kebutuhan lembaga PAUD, antara lain kondisi sarana dan prasarana pendidikan, kebutuhan tenaga pendidik, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

Komunikasi yang terbangun secara terbuka mendorong terciptanya kesamaan persepsi mengenai pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia desa. Selain menjadi media penyampaian informasi, komunikasi juga berfungsi membangun kepercayaan (*trust*), komitmen bersama, dan rasa saling memiliki terhadap program pembangunan desa.

Temuan ini sejalan dengan konsep sinergitas yang dikemukakan oleh (Mulyana, 2020), yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan unsur utama dalam membangun kemitraan antarpemangku kepentingan karena memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penyamaan persepsi, serta pembentukan komitmen bersama. (Covey, 2013) juga menjelaskan bahwa sinergi terbentuk ketika berbagai pihak mampu mengelola perbedaan menjadi kekuatan kolektif sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dibandingkan apabila setiap aktor bekerja secara terpisah.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh (Ansell & Gash, 2008) bahwa dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*) merupakan tahap awal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan dan menghasilkan komitmen bersama antaraktor. Dengan demikian, komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan di Desa Nusa Agung menjadi fondasi utama dalam memperkuat tata kelola kolaboratif guna mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

Koordinasi dalam Penguatan Kemitraan Pemerintah Desa dan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Nusa Agung secara aktif melakukan koordinasi dengan pengelola PAUD, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat dalam menyusun berbagai program pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Bentuk koordinasi tersebut diwujudkan melalui identifikasi kebutuhan lembaga PAUD, pemantauan kondisi fasilitas pendidikan, pembahasan usulan pembangunan, serta pengalokasian anggaran desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Koordinasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan membagi tugas antaraktor, tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan pembangunan pendidikan di desa. Pemerintah desa berperan sebagai koordinator yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan desa sehingga setiap program yang dirancang memiliki tingkat relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat.

Temuan tersebut sesuai dengan konsep koordinasi dalam sinergitas yang dikemukakan oleh (Mulyana, 2020) bahwa koordinasi merupakan proses penyelarasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar seluruh kegiatan organisasi berjalan menuju tujuan yang sama. Efektivitas koordinasi dipengaruhi oleh adanya hubungan langsung, tujuan yang jelas, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya organisasi. Selain itu, (Emerson dkk., 2012) menjelaskan bahwa koordinasi merupakan bagian dari *collaborative dynamics* yang memungkinkan berbagai aktor membangun kapasitas bersama (*shared capacity*) dalam menyelesaikan persoalan publik. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa Nusa Agung telah memperkuat hubungan kemitraan dengan masyarakat sehingga mendukung peningkatan kualitas layanan PAUD sebagai salah satu indikator pembangunan sosial desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran desa, keterbatasan jumlah tenaga pendidik, serta belum optimalnya fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang baik perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Sinkronisasi Program sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Desa Berkelanjutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinkronisasi dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai media penyelarasan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan desa. Pemerintah Desa Nusa Agung mengakomodasi berbagai usulan yang disampaikan oleh pengelola PAUD, tenaga pendidik, dan masyarakat sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan desa.

Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan penyelenggaraan PAUD dapat dipetakan secara lebih sistematis sehingga pemerintah desa memiliki dasar yang jelas dalam menentukan prioritas pengalokasian sumber daya pembangunan. Sinkronisasi tersebut

juga mendorong terciptanya kesesuaian antara perencanaan pembangunan desa dengan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan pendapat (Syafiie, 2022) yang menyatakan bahwa sinkronisasi merupakan proses penyelarasan berbagai kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program serta mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. (Sinaga dkk., 2025) juga menjelaskan bahwa sinkronisasi antara perencanaan dan kondisi lapangan akan menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, sinkronisasi kebijakan merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola kolaboratif karena memungkinkan setiap keputusan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. (World Bank, 2022) menegaskan bahwa pembangunan desa yang berkelanjutan memerlukan integrasi antara kapasitas pemerintah, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal. Pendapat tersebut diperkuat oleh (United Nations Development Programme, 2024) yang menyatakan bahwa tata kelola kolaboratif menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan pembangunan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Tata Kelola Kolaboratif terhadap Pembangunan Desa Berkelanjutan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif yang dibangun Pemerintah Desa Nusa Agung telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai bagian dari pembangunan desa berkelanjutan. Komunikasi yang terbuka, koordinasi yang berjalan secara aktif, dan sinkronisasi program melalui Musrenbangdes telah menciptakan hubungan kemitraan antara pemerintah desa, pengelola PAUD, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas tata kelola kolaboratif masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran desa, belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan, keterbatasan tenaga pendidik, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah desa, peningkatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, optimalisasi dukungan sumber daya, serta pemberdayaan masyarakat agar kolaborasi yang telah terbangun mampu menghasilkan layanan PAUD yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Temuan penelitian ini memperkuat teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008; Emerson dkk., 2012) dan konsep sinergitas (Covey, 2013; Mulyana, 2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang efektif. Dengan demikian, penguatan tata kelola kolaboratif menjadi strategi yang relevan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif antara Pemerintah Desa Nusa Agung dan masyarakat telah berperan sebagai strategi dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan melalui penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Implementasi tata kelola kolaboratif diwujudkan melalui komunikasi yang intensif, koordinasi yang berkesinambungan, dan sinkronisasi program antara pemerintah desa, pengelola PAUD, tenaga pendidik, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut tercermin dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dukungan pembiayaan sesuai dengan kapasitas anggaran desa, serta pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengembangan layanan PAUD.

Meskipun demikian, efektivitas tata kelola kolaboratif masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran desa, belum memadainya fasilitas pendidikan, terbatasnya jumlah tenaga pendidik, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa berkelanjutan tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah desa, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola kolaboratif perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, penguatan koordinasi dan komunikasi antarpemangku kepentingan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan. Selain memberikan kontribusi praktis bagi Pemerintah Desa Nusa Agung, hasil penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam pengembangan pendidikan berbasis masyarakat sebagai bagian dari implementasi pembangunan desa berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543–571.
- Covey, S. R. (2013). *The 8th habit: From effectiveness to greatness*. Simon and Schuster. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4ZBYShSD3cQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Covey,+S.+R.+\(2008\).+The+8th+Habit:+From+Effectiveness+to+Greatness.+Free+Press.&ots=S1aNAhmGi2&sig=bxned0Fym57CMn9iwkm83OF2qoA](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4ZBYShSD3cQC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Covey,+S.+R.+(2008).+The+8th+Habit:+From+Effectiveness+to+Greatness.+Free+Press.&ots=S1aNAhmGi2&sig=bxned0Fym57CMn9iwkm83OF2qoA)
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1–29.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2024). *Indeks Desa Membangun (IDM) 2024*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). *Merdeka Belajar: Transformasi Pendidikan Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Mulyana, S. (2020). Sinergitas dan Kemitraan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan di Jawa Barat. dalam [https://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/sinergitas-dankemitraan-perencanaan-program/diakses pada, 26](https://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/05/sinergitas-dankemitraan-perencanaan-program/diakses_pada,26).
- Sinaga, K., Jamaluddin, Y., Pasaribu, V. A. R., Kholik, K., Tressa, R., Akibu, R. S., Tenerman, MPA, K. A., S. Sos, M.AP, N. A. A., Haris, R. A., & Syafrizal. (2025). *Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan*. umsu press.
- Syafiie, I. K. (2022). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Legis. No. 3 (2024).
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*.
- UNICEF Indonesia. (2023). *Early Childhood Education in Indonesia*.
- United Nation. (2025). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development* / Department of Economic and Social Affairs. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- United Nations Development Programme. (2024). *Human Development Report 2023/2024*.
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (Vol. 6). Sage Thousand Oaks, CA. https://www.academia.edu/download/106905310/Artikel_Yustinus_Calvin%20Gai_Mali.pdf